



PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR DAN PRODUK
DOMESTIK BRUTO TERHADAP TINGKAT
HARGA UMUM DI INDONESIA
PERIODE 1983 - 1999



REKAMING POKOK TEMA 2. 1988

No. 1	3-12-2001
No. 2	Fak. Ekonomi
No. 3	1 lly
No. 4	Hadiah
No. 5	011808-334
No. 6	16122

OLEH :

SRI ASTUTY
A111 97 073

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2001

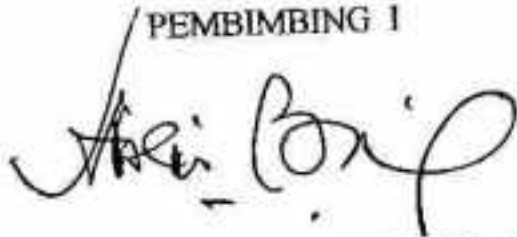
**PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR DAN PRODUK DOMESTIK
BRUTO TERHADAP TINGKAT HARGA UMUM
DI INDONESIA PERIODE 1983 - 1999**

**OLEH :
SRI ASTUTY
A111 97 073**

**Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Makassar**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



(DRS. H. HUSEIN BADAHING, MA)

PEMBIMBING II



(DRS. BACHTIAR MUSTARI, M.Si)

Kemudian penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Bapak *Drs. Anwar Kamaruddin* dan keluarga Bapak *H.A. Azis Pawelloi* serta *Kak Ruli, Wiwin dan Adik Ari*. Khusus buat sahabatku "*Hadikesumanjaya*", anyhow you ever as My Best Friend, thanks for you care and everthing you do it for Me ... I will remember forever.

Penulis juga tak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Bapak **Drs. H. Huscin Badawing, MA** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. Bachtiar Mustari, M.Si** selaku Pembimbing II, atas keikhlasan beliau meluangkan waktu dan pikirannya dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak **Drs. Tadjuddin Parenta, MA** sebagai Penasehat Akademik yang banyak memberikan bimbingan selama menjalani proses perkuliahan.
- Bapak **Drs. Taslim Arifin, MA** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, para Pembantu Dekan, Bapak **Muh. Yunus Zain, Ph.D** dan **Drs. Madris, M.Si** sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan serta segenap Dosen dan Staf pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Bapak Pimpinan Bank Indonesia Cabang Makassar beserta seluruh Staf (*Pak Yoel, Pak Syamsul, Pak Bastian, Pak Taufik, Pak Tony*) serta Bapak Pimpinan Badan Pusat Statistik Cabang Makassar.
- Sahabat sekaligus teman curhatku "*Yaya*" thanks atas segala bantuan, perhatian dan dukungannya selama ini plus ... jalan-jalannya.

Kemudian penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar Bapak *Drs. Anwar Kamaruddin* dan keluarga Bapak *H.A. Azis Pawelloi* serta *Kak Ruli, Wiwin dan Adik Ari*. Khusus buat sahabatku "*Hadikesumanjaya*", anyhow you ever as My Best Friend, thanks for you care and everthing you do it for Me ... I will remember forever.

Penulis juga tak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Bapak **Drs. H. Husein Badawing, MA** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. Bachtiar Mustari, M.Si** selaku Pembimbing II, atas keikhlasan beliau meluangkan waktu dan pikirannya dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak **Drs. Tadjuddin Parenta, MA** sebagai Penasehat Akademik yang banyak memberikan bimbingan selama menjalani proses perkuliahan.
- Bapak **Drs. Taslim Arifin, MA** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi, para Pembantu Dekan, Bapak **Muh. Yunus Zain, Ph.D** dan **Drs. Madris, M.Si** sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan serta segenap Dosen dan Staf pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Bapak Pimpinan Bank Indonesia Cabang Makassar beserta seluruh Staf (*Pak Yoel, Pak Syamsul, Pak Bastian, Pak Taufik, Pak Tony*) serta Bapak Pimpinan Badan Pusat Statistik Cabang Makassar.
- Sahabat sekaligus teman curhatku "*Yaya*" thanks atas segala bantuan, perhatian dan dukungannya selama ini plus ... jalan-jalannya.

- Teman-teman di "SP 97"; *Desti, Sukma, Ery, Yaya, Jumi, Ida, Hasda, Agus, Yanti, Nining, Uya, Chida, Mila, Nilam, Icha, Catrine, Ina, Poppy, Sarah, Ancu, Fitri, Sri, Lufi, Epo, Wandi* serta semua yang sempat terlupa, thanks atas segala bantuan dan kebersamaannya.
- Kepada "*Yuliansyah*", terima kasih atas saran dan dorongan morilnya kepada penulis plus ... traktirnya serta temanku *Rony, Amir, Arma, Ami, Leni* dan teman-teman lainnya di Fakultas Ekonomi yang tidak sempat Penulis sebut satu persatu.
- Teman-teman KKN Gel. 60 Kec. Alla Kabupaten Enrekang; *Tuti, Nila, Endah, Fahmi, Acil, Arya, Tamwir, Lukman, Fikar, Uci, Andy, Rani, Isda, Ismet, Syarif, Musda, Ilo*, serta *Pono* (thanks sudah menemani Penulis) serta teman-teman lain yang sempat terlupa.
- And so ... for kawan seperjuangan Posko KKN Desa Mundan; "*Joko*" (Teknik) thanks atas bantuan dan saran-sarannya, "*Sari*" (Pertanian) thanks telah mendengarkan keluh-kesahku, "*Ambar*" (Fisip), "*Bahar*" (Pertanian), "*Kak Chimenk*" (Fisip) thanks atas kebersamaannya serta "*Awine*" (Peternakan) thanks atas segala perhatiannya. Suka duka selama dua bulan bersama kalian merupakan kenangan yang sulit Penulis lupakan.

Akhirnya Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangan sebagai suatu karya yang bersifat ilmiah. Namun inilah hasil maksimal yang dapat dipersembahkan oleh Penulis. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Makassar, November 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	i i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Kegunaan Penulisan	5
1.4 Hipotesis	5
1.5 Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Jumlah Uang Beredar	7
2.2 Pengertian Produk Domestik Bruto	13
2.3 Pengertian Tingkat Harga Umum	14
2.3.1 Teori Kuantitas oleh Irving Fisher	17
2.3.2 Pandangan dari Kennes dan Monetaris	21
BAB III METODOLOGI	
3.1 Kerangka Konseptual	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	25
3.3 Metode Penelitian	26

3.4	Model Analisis	26
3.5	Batasan Variabel	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia.....	29
4.1.1	Perkembangan Jumlah Uang Beredar	29
4.1.2	Perkembangan Produk Domestik Bruto.....	29
4.1.3	Perkembangan Tingkat Harga Umum.....	36
4.2	Hasil Empirik Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Harga Umum	52
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN.....		58

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel IV.1	Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M_1) Tahun 1983 – 1999 dalam Milyar Rupiah.....	34
Tabel IV.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Uang Beredar di Indonesia Periode 1983 – 1999 dalam Milyar Rupiah.....	35
Tabel IV.3	Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1983-1999 dalam Milyar Rupiah.....	43
Tabel IV.4	Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1983-1999 dalam Milyar Rupiah.....	44
Tabel IV.5	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 1983-1999 dalam Milyar Rupiah.....	45
Tabel IV.6	Tingkat Harga Umum Di Indonesia (Gabungan 27 Kota)	50
Tabel IV.7	Laju Inflasi Di Indonesia Tahun 1983 – 1999	51



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kurva Demand Pull Inflation.....	16
Gambar 2.2. Kurva Cost Push Inflation	16

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar, Produk Domestik Bruto dan Tingkat Harga Umum Periode 1983-1999 58
Lampiran 2	Regresi Pengaruh JUB dan PDB terhadap THU 59
Lampiran 3	Tabel t (Uji t)..... 60
Lampiran 4	Tabel f (Uji f) 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik materil maupun spritual. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah semata, melainkan keserasian dan keseimbangan antara keduanya dan pembangunan itu hendaklah merata di seluruh masyarakat. Dalam hal ini seringkali dikaitkan dengan penekanan pada pembangunan ekonomi nasional sebagai salah satu kesepakatan untuk mencapai pembangunan dalam arti yang luas.

Sasaran pembangunan ekonomi Indonesia antara lain meliputi peningkatan produksi nasional, stabilitas ekonomi dan stabilitas moneter, neraca pembayaran, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Demikian luasnya jangkauan pembangunan, sehingga untuk mencapai sasaran tersebut maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan memberikan prioritas pada salah satu sasaran.

Oleh karena itu untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, maka yang perlu diperhatikan yaitu berapa banyaknya barang yang dibeli masyarakat dengan pendapatan yang dimiliki. Dengan kata lain yang menjadi ukuran adalah tingkat kesejahteraan yang ditakar melalui Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam hal mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut maka pemerintah seringkali menempuh berbagai upaya yaitu antara lain dengan membuat suatu kebijaksanaan, baik kebijaksanaan di bidang moneter maupun kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk memelihara kestabilan ekonomi terutama kestabilan harga yaitu menyangkut berbagai usaha dalam mempengaruhi berbagai aspek dan kaitan dengan berbagai variabel ekonomi (makro).

Kebijakan moneter pada hakekatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi uang beredar. Sebagai satu variabel ekonomi guna dapat dicapainya sasaran tertentu dalam kehidupan ekonomi dengan dapat mengendalikan jumlah uang beredar, maka pencapaian sasaran moneter baik sasaran antara maupun sasaran akhir dapat tercapai. Sasaran-sasaran kegiatan ekonomi moneter tersebut terbagi atas sasaran antara yaitu jumlah cadangan bank, tingkat suku bunga serta peredaran uang di masyarakat, sedangkan sasaran akhir adalah dengan tercapainya laju inflasi rendah dan laju pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) yang cepat.

Adapun kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung efektifitas kebijaksanaan moneter di Indonesia masih dalam taraf pembangunan. Tingkat monetisasi perekonomian yang diukur dengan nisbah likuiditas perekonomian (M_2) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih relatif rendah, yaitu sekitar 28%. Dalam pada itu, tingkat penggunaan jasa perbankan seperti tercermin pada pangsa uang terhadap uang beredar (M_1), masih relatif rendah yaitu sekitar 50%, sementara

Dalam pada itu, tingkat penggunaan jasa perbankan seperti tercermin pada pangsa uang terhadap uang beredar (M_1), masih relatif rendah yaitu sekitar 50%, sementara di negara-negara maju sudah berkisar 75%. Selanjutnya dengan jaringan perbankan masih belum cukup meluas, teknologi perbankan masih belum canggih dan sebagainya (Iswardono, 1990:135).

Untuk mencapai pembangunan dalam arti luas, maka salah satu tolak ukur untuk melihat sejauh mana tingkat produksi suatu negara yaitu melalui perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB menggunakan ukuran harga yang berlaku di pasar untuk menghimpun angka dari berbagai jenis komoditi menjadi salah satu kesatuan angka.

Perekonomian Indonesia selama tahun pengamatan, diwarnai dengan semakin meningkatnya jumlah uang beredar (M_1) dari tahun ke tahun. Jumlah uang beredar merupakan penjumlahan dari uang kartal dan uang giral. Sebagai contoh jumlah uang beredar pada tahun 1984 mengalami peningkatan sebesar Rp 8.183 milyar jika dibandingkan dengan 1983 yang hanya sebesar Rp 7.505 milyar. Perubahan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu aktiva luar negeri dan tagihan pada perusahaan-perusahaan swasta dan perorangan yang semakin meningkat.

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah uang beredar di Indonesia, maka tingkat harga di Indonesia juga mengalami peningkatan dalam hal ini tingkat harga umum yang merupakan rata-rata semua harga

barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan ini merupakan akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa guna mencapai tingkat kesejahteraan.

Dengan menyimak uraian di atas yaitu antara variabel jumlah uang beredar, produk domestik bruto dan tingkat harga umum, maka penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih jauh tentang: **“PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP TINGKAT HARGA UMUM DI INDONESIA PERIODE 1983-1999”**

1.2 Masalah Pokok

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas serta keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah **“Sejauh mana perkembangan dan pengaruh jumlah uang beredar dan produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum di Indonesia selama periode 1983-1999”**.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penulisan ini adalah **“Untuk mengetahui berapa besar pengaruh jumlah uang beredar dan produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum di Indonesia periode 1983-1999”**.



1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka selanjutnya diharapkan:

1. Untuk memberi gambaran mengenai perkembangan dan pengaruh jumlah uang beredar, produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum di Indonesia.
2. Sebagai bahan pertimbangan baik untuk penulis sendiri maupun orang lain yang memerlukan.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis kemukakan dan melihat tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, maka dapat ditarik hipotesis yaitu "Diduga bahwa jumlah uang beredar dan produk domestik bruto mempengaruhi tingkat harga umum secara positif dan signifikan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang, Masalah Pokok, Tujuan dan Kegunaan, Hipotesis serta Sistematika Pembahasan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka, yang akan menguraikan tentang pengertian dari teori-teori jumlah uang beredar, produk domestik bruto dan tingkat harga umum.
- BAB III** : Metodologi, yang terdiri dari: Kerangka Konseptual, Jenis dan Sumber Data, Metode Penelitian, Model Analisis, serta Batasan Variabel.

- BAB VI** : Hasil dan Pembahasan, yang membahas secara umum mengenai perkembangan dan pengaruh jumlah beredar dan produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum serta hasil empirik.
- BAB V** : Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Jumlah Uang Beredar

Ciri yang paling menonjol dari kebijaksanaan moneter di Indonesia adalah penciptaan uang yang beredar. Adapun pengertian jumlah uang beredar Dernburg dan Mc. Dougall (1981;137) adalah sebagai berikut:

“ Jumlah uang beredar (*the supply of money*) adalah seluruh uang kartal dan giro tetapi bukan deposito tabungan yang berada ditangan masyarakat yang bukan bank”. Itu berarti dalam kenyataannya bahwa jumlah uang yang beredar adalah jumlah persediaan kekayaan likuid yang tidak menghasilkan bunga yang berada di tangan masyarakat.

Menurut Manullang (1983;107), jumlah uang beredar dalam masyarakat terdiri dari:

1. Semua uang giral atau demand deposit atau tagihan-tagihan umum pada bank-bank.
2. Seluruh uang kertas bank yang ada di tangan masyarakat yang berada di luar bank-bank dagang dan Bank Sentral.
3. Seluruh uang logam dan uang kertas pemerintah yang ada di tangan masyarakat, yang berada di luar bank-bank dagang dan Bank Sentral.

Selanjutnya menurut G. Lipsey (1991;187) ia membedakan pengertian jumlah uang yang beredar ke dalam tiga bagian yaitu:

1. M_1 (jumlah uang beredar dirumuskan dalam arti sempit), meliputi uang kartal dan deposito yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Termasuk pula *Order of Withdrawal (NOW)*, *Automatic Transfer Service (ATS)* dan rekening-rekening yang serupa pada koperasi simpan pinjam dan bank-bank tabungan (selain uang kartal yang biasa kita lihat dan deposito).
2. M_2 (defenisi yang lebih luas) adalah M_1 ditambah dengan tabungan dan segala jenis deposito berjangka yang lebih pendek, termasuk juga rekening pasar uang dan pinjaman semalam antar bank.
3. M_3 adalah M_2 ditambah dengan beberapa komponen dan terpenting adalah sertifikat deposito yang berjumlah besar.

Dari ketiga defenisi JUB yang dikemukakan oleh Lipsey tersebut di atas, terlihat bahwa komponen M_1 merupakan komponen yang paling likuid. Kerena proses menciptakan menjadi uang kas begitu cepat dan tidak mengalami perubahan atau kerugian nilai, sedangkan M_2 dan M_3 mempunyai tingkat likuiditas yang paling rendah, karena proses perairannya memerlukan jangka waktu tertentu.

Dari beberapa defenisi JUB di atas, yang digunakan dalam penulisan ini adalah jumlah uang beredar dalam arti sempit (M_1), sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan (1991:61), sebagai berikut:

“Jumlah Uang Beredar (*Money Supply*) di Indonesia didefenisikan sebagai tagihan masyarakat terhadap sektor perbankan dan terbatas pada jumlah antara uang kartal dan uang giral”.

Adapun penciptaan uang kartal adalah dimonopoli oleh pemerintah, sedangkan uang giral diciptakan oleh bank-bank umum sesuai permintaan dari nasabahnya. Jadi jumlah uang yang beredar atau penawaran uang merupakan hasil bersama dari perilaku pemerintah (Bank Sentral), bank-bank umum dan masyarakat (khususnya nasabah-nasabah bank). Dalam hal ini tidak dapat disangkal bahwa dari ketiga golongan ini pemerintahlah (Bank Sentral) yang mempunyai pengaruh yang paling besar sebab hanya dapat menciptakan uang giral atas dasar sejumlah tertentu uang kartal yang dipergunakan oleh bank tersebut (Rahardja, 1990:26).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tanpa ada uang kartal tidak akan ada uang giral dan setiap benih uang kartal yang diciptakan merupakan benih bagi terciptanya beberapa rupiah uang giral. Hal inilah sehingga jumlah uang yang beredar pada umumnya bisa ditentukan secara langsung oleh penguasa moneter tanpa mempersoalkan hubungannya dengan uang inti, yang terdiri dari uang kartal ditambah cadangan yang dimiliki oleh bank-bank umum.

Perilaku demikian berlandaskan pada analisa penentuan JUB secara mekanis, dimana jumlah uang yang beredar dihubungkan dengan uang inti lewat angka pengganda. Besarnya angka pengganda ini ditentukan oleh ratio antara uang kartal dan uang giral, sehingga bila diasumsikan bahwa kedua perbandingan (*ratio*) tersebut konstan untuk suatu periode tertentu maka penguasa moneter bisa mengendalikan JUB secara langsung dengan menentukan cadangan perbankan.

Kemudian angka pengganda ini secara matematis dijelaskan sebagai berikut:

$$B = C + R$$

di mana :

B = Uang inti

C = Uang kartal yang dipegang oleh masyarakat umum

R = Reserve ratio

Atas dasar reserva bank (R) yang disimpan maka bank-bank menciptakan uang giral yang berupa saldo-saldo rekening koran yang dimiliki oleh masyarakat umum yang disimpan oleh bank-bank (D). Jadi JUB mencakup uang kartal yang dipegang oleh masyarakat umum di luar bank (C) dan uang giral yang diciptakan oleh bank-bank umum (D):

$$M = C + D$$

Di mana M = Jumlah uang yang beredar

Bila dihubungkan kedua persamaan di atas dan kita defenisikan:

$$c = C/M$$

$$r = R/D$$

di mana :

c = Hasil perilaku atau hasil keputusan yang diambil oleh masyarakat umum.

r = Hasil perilaku atau hasil keputusan yang diambil oleh bank-bank umum.

Maka kita dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

$$M = \frac{1}{c+r(1-c)} B$$

Persamaan ini menunjukkan bagaimana uang inti (B) dilipatkan menjadi uang beredar. Pelipatan uang atau multiplier uang biasanya lebih besar dari 1 (satu). Akan tetapi seperti dikatakan di atas bahwa bila *money multiplier* itu tetap suatu periode, maka pemerintah dengan mudah dapat menentukan besar kecilnya serta perubahan jumlah uang beredar tergantung pada perubahan B. Sedangkan perubahan B tergantung pada besar kecilnya C dan R.

Kalau anggapan "*money multiplier*" di atas dilepaskan, maka besar kecilnya "*money multiplier*" itu menentukan besarnya JUB. Besar kecilnya "*money multiplier*" tergantung pada perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi c (fraksi uang kartal terhadap uang beredar) dan r (nilai cadangan) yaitu sebagai berikut (Iswardono, 1990;18-119):

a. Faktor-faktor mempengaruhi c antara lain:

- 1) Pendapatan, dalam artian pendapatan yang dapat jika memegang uang giral. Dengan memegang uang kartal maka dipunya likuiditas yang tinggi dan kalau menyimpan uang giral disamping likuiditas terjamin, mungkin dapat penghasilan berupa tingkat bunga.
- 2) Kekayaan, orang mempunyai kekayaan dalam jumlah yang sangat besar (orang kaya) akan memegang uang kartal dalam jumlah yang kecil sedangkan orang miskin akan memegang uang kartal dalam jumlah yang besar.

3) Banyak/sedikitnya penggunaan alat pembayaran pengganti seperti kartu kredit (*credit card*) dan *charge account*. Semakin banyak alat pembayaran pengganti semakin kecil jumlah uang kartal yang di pegang. Sebaliknya, makin sedikit (atau mungkin dengan tidak adanya) alat pembayaran pengganti akan semakin besar uang kartal yang diinginkan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi r (nilai cadangan)

- 1) Besarnya *reserve ratio/cash ratio* yang diwajibkan oleh Bank Sentral untuk dipegang oleh bank-bank umum.
- 2) Besarnya kelebihan cadangan yang dipegang untuk bank umum ini terjadi karena biasanya bank-bank umum memegang *required reserve* lebih besar dari pada ketentuan yang dibuat untuk Bank Sentral.

Dari uraian Boediono (1980;67-70) di atas maka dapat ditarik kesimpulan sementara sebagai berikut:

1. JUB bisa dipengaruhi oleh pemerintah melalui Bank Sentral secara langsung dengan mengontrol besar/kecilnya B .
2. Dalam kaitan dengan yang pertama, pemerintah mempengaruhi B melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mempunyai *required reserve*, misalnya dengan penentuan *cash ratio*, kredit likuiditas dan lain-lain.
3. Selain hal tersebut, jumlah uang beredar ditentukan oleh perilaku bank-bank umum dan masyarakat.
4. Jelaslah bahwa M mempunyai elastisitas terhadap tingkat bunga maupun tingkat harga.

2.2 Pengertian Produk Domestik Bruto (PDB)

Apabila kita berbicara mengenai pembangunan ekonomi suatu negara maka kita tidak terlepas dari istilah *Gross National Product* (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB), dan juga istilah *Gross Domestik Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB).

Gross Domestik Product = Pendapatan Domestik Bruto adalah keseluruhan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun (Zulkarnain, Djamin, 1984;10).

Pengukuran PDB dapat dilakukan menurut tiga pendekatan, yaitu dengan metode produksi, pendapatan dan metode pengeluaran. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi di atas dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 11 lapangan usaha.
- 2) Menurut pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima untuk faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu balas jasa yang dimaksud adalah gaji dan upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak langsung.
- 3) Menurut pendekatan pengeluaran (PDB) yaitu semua komponen permintaan akhir, seperti: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta,

konsumsi pemerintah pembentuk dan modal tetap, perubahan *stock* dan *ekspor netto* dalam jangka waktu tertentu.

2.3 Pengertian Tingkat Harga Umum

Tingkat harga umum adalah rata-rata semua harga barang-barang dan jasa-jasa dalam jangka waktu tertentu. Dari sekian macam barang setiap saat sebagian harganya naik, sedangkan yang lainnya turun. Oleh karena rata-rata perubahan ini mempunyai arti ekonomi maka perlu diberikan bobot yang sesuai kepada masing-masing barang. Hal ini oleh pakar statistik menggunakan tehnik-tehnik angka indeks dan dengan angka tersebut maka kita dapat menggunakan perubahan rata-rata dari berbagai kelompok harga (Pertadiredja, 1983;140).

Adapun cara perhitungan tingkat harga umum, secara statistik menurut Deudley dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen (IHK) mengukur harga pokok/untuk membeli sejumlah barang tertentu, yang mewakili pembelian yang dilakukan oleh para konsumen di kota.

2) Deflator GNP

Deflator GNP adalah rasio GNP nominal dalam tahun tertentu terhadap GNP riil dan ia merupakan ukuran inflasi dari periode dimana harga dasar untuk menghitung GNP riil digunakan sampai pada periode sekarang.

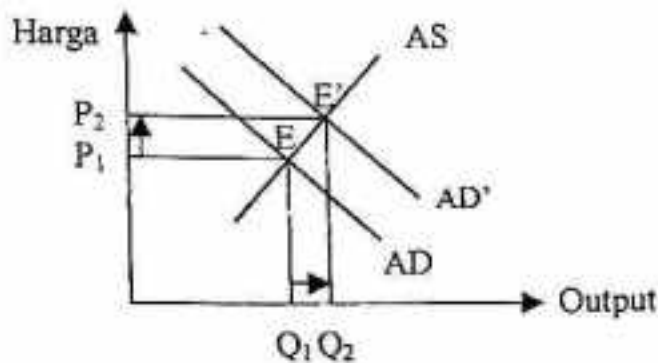
Karena deflator GNP didasarkan atas perhitungan yang meliputi semua barang yang diproduksi dalam perekonomian, deflator GNP merupakan indeks harga yang secara luas digunakan sebagai basis untuk mengukur inflasi.

Pengertian inflasi secara umum adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Sedangkan menurut Manullang (1993:83) "Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga atau meningkatnya harga-harga pada umumnya atau suatu keadaan dimana terdapat penurunan nilai mata uang".

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi terbagi atas dua, yaitu:

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi tarikan permintaan terjadi karena adanya kelebihan dalam permintaan. Menurut Sukirno (198:174), bahwa permintaan masyarakat akan barang-barang (*Aggregate Demand*) melebihi penawaran akan barang-barang tersebut. Kenaikan permintaan akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Inflasi karena adanya kelebihan permintaan ini pada gambar 2.1., dimana kurva AS kemiringan curam sekali, maka dengan bertambahnya pengeluaran agregat berakhir dengan naiknya harga-harga. Harga naik dari P_1 ke P_2 , jadi permintaan yang naik lebih besar menyebabkan naiknya harga-harga, inilah inflasi tarikan permintaan.

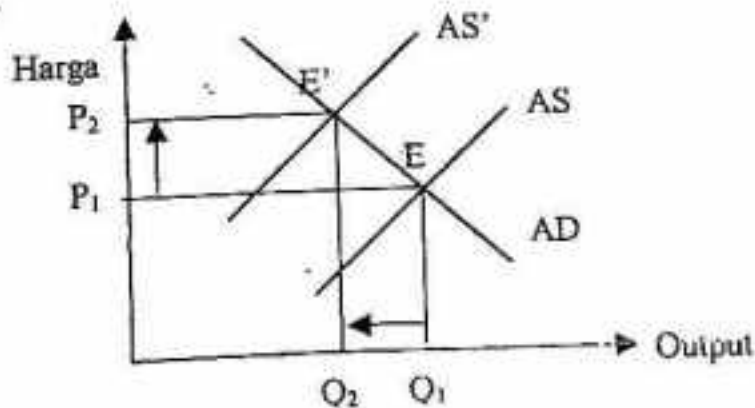


GAMBAR 2.1. Demand Pull Inflation

2. Inflasi Penawaran (*Cost Push Inflation*)

Inflasi penawaran yaitu inflasi yang terjadi akibat kenaikan biaya produksi dan kenaikan harga yang berlaku (Dernburg, 1981:55).

Inflasi dari sudut penawaran dapat pula disebabkan oleh adanya kenaikan upah pekerja, sehingga kenaikan upah ini mengakibatkan kenaikan harga-harga yang ditawarkan produsen, ini akibat dampak kenaikan harga pokok produsen (upah buruh naik). Inflasi penawaran ini ditunjukkan pada gambar 2.2., dimana semua biaya-biaya akan menggeser kurva AS ke atas menjadi AS', akibat harga-harga meningkat dari P_1 menjadi P_2 , maka terjadilah inflasi desakan biaya (*Cost Push Inflation*).



GAMBAR 2.2. Cost Push Inflation

Inflasi tarikan permintaan bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi kerja telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja. Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan Produk Domestik Bruto (PDB) berada di atas dan melebihi PDB pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya "*inflationary gap*" yang dapat menimbulkan inflasi (Nopirin, 1987;28).

Berdasarkan uraian pengertian dari variabel yang digunakan, maka penulis mencoba menghubungkan antara ketiga variabel yang digunakan oleh para ahli:

2.3.1 Teori Kuantitas oleh Irving Fisher

Berdasarkan teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher, dimana dikatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya nilai uang yaitu: (1) Penawaran uang atau disebut juga dengan jumlah uang; (2) Kecepatan peredaran uang atau sering juga dikaitkan orang dengan permintaan terhadap uang; (3) Jumlah barang yang diperdagangkan. Irving Fisher merumuskan teorinya dengan suatu persamaan (Iswardono, 1991;88):

$$M V = P T$$

di mana:

M = JUB

V = Kecepatan Peredaran Uang

P = Harga

T = Transaksi



Di mana inflasi dari teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permintaan akan uang di dalam masyarakat merupakan suatu produksi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi merupakan suatu proporsi konstan pula dari tingkat output masyarakat (pendapatan nasional). Jadi pada analisis akhir permintaan uang ditentukan oleh faktor lain seperti tingkat bunga.
2. Dari segi kebijaksanaan ekonomi makro ini mempunyai implikasi penting yaitu pada tingkat pendapatan nasional ekuilibrium atau tingkat harga umum terjadi apabila sudah terjadi *full employment* dan tidak bisa lagi dipengaruhi oleh kebijaksanaan fiskal.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi nilai uang dan pada waktu yang bersamaan akan mempengaruhi pula tingkat harga. Ketiga faktor tersebut adalah M , T dan V . Selanjutnya akan dijelaskan secara singkat bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat harga dan nilai uang apabila salah satu faktor mengalami perubahan (Sinungan, 1995:24):

- 1) Jika M (jumlah uang beredar) naik, sedangkan kedua faktor lainnya yakni V (kecepatan peredaran uang) dan T (transaksi) tetap, maka P (harga) akan naik dan sebaliknya jika M (jumlah uang beredar) menurun, V (kecepatan peredaran uang) dan T (transaksi) tetap, akan mengakibatkan P (harga) turun.
- 2) Jika V naik, sedang kedua faktor lain yakni M (jumlah uang beredar) dan T (transaksi) tetap, akibatnya P (harga) akan naik, sebaliknya jika V (kecepatan peredaran uang) turun, sedang kedua faktor lain yakni M (jumlah uang beredar) dan T (transaksi) tetap, maka P (harga) akan turun.

- 3) Jika T (transaksi) naik, sedang kedua faktor lain yakni M (jumlah uang beredar) dan V (kecepatan peredaran uang) tetap, maka P (harga) akan naik. Dengan kata lain apabila T (transaksi) naik, M (jumlah uang beredar) dan V (kecepatan peredaran uang) tetap, maka akan mengakibatkan P (harga) naik, sebaliknya apabila T (transaksi) turun, M (jumlah uang beredar) dan V (kecepatan peredaran uang) tetap, maka P (harga) akan turun pula.

Untuk mengetahui keeratan atau keterkaitan antara variabel-variabel yang digunakan, dimana dalam hal ini mengaitkan hubungan antara jumlah uang beredar, produk domestik bruto, dan tingkat harga umum, yaitu sebagai berikut:

Mengambil variabel kebijaksanaan moneter, karena kebijaksanaan moneter ini aspeknya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan luar. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah, namun ditentukan oleh mekanisme pasar.

Karena metode simultan menuntut adanya keterkaitan antara variabel tersebut, maka harus ditentukan suatu variabel netral yang sifatnya tidak terlepas dari kebijaksanaan moneter maupun kebijaksanaan fiskal namun memiliki hubungan yang erat dengan variabel yang sudah ada yaitu MT dan PT. Untuk itu digunakan persamaan *Cambridge* dengan mengangap *Ceteris Paribus*, permintaan uang adalah proporsional dengan tingkat pendapatan nasional:

$$M = k \cdot P \cdot Y$$

di mana:

M = Permintaan Uang

P = Tingkat Harga

Y = Income Riil

k = Besar kecilnya keinginan masyarakat untuk memegang bagian dari pendapatan dalam bentuk uang kas.

Perbedaan antara kedua teori tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Irving Fisher menekankan pada permintaan uang semata-mata yang merupakan proporsi konstan dari volume transaksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan yang konstan.
2. Teori *Cambridge* menekankan pada faktor perilaku yang menghubungkan antara permintaan uang riil dengan volume transaksi yang direncanakan.

Ceteris Paribus pada tingkat harga umum akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume uang yang beredar, yang berarti bahwa faktor-faktor lain seperti tingkat pendapatan nasional riil, tingkat bunga dan harapan adalah konstan.

Perbedaan ini sangat penting, karena tidak menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor tersebut berubah meskipun dalam jangka pendek dan jika seandainya faktor ini berubah maka ratio perbedaan uang akan berubah apabila tingkat bunga naik dan akan ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi uang yang mereka pegang, meskipun volume transaksi yang mereka rencanakan tetap.

Dalam model Keynes yang paling sederhana, P dianggap konstan untuk tingkat output dibawah *full employment* dan akan berubah secara proporsional dengan supply uang pada *full employment* output. Tetapi tekanan dari teori ini adalah bahwa pasar uang menentukan tingkat bunga.

Dalam hal ini Keynes menyatakan bahwa sebelum tercapai *full employment* maka perubahan supply yang bersama dengan permintaan uang mempengaruhi tingkat bunga. Selanjutnya tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat investasi (riil) yang kemudian melalui proses akan mempengaruhi tingkat output masyarakat (tingkat pendapatan nasional riil).

2.3.2 Pandangan dari Keynes dan Monetarist

Pada mulanya perbedaan antara keduanya terletak pada peranan uang dan kebijaksanaan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Monetarist berpendapat bahwa jumlah uang merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi (*money matters*). Pada mulanya Keynes tidak sependapat (*money does not matters*), namun mereka kemudian dapat menerima arti pentingnya jumlah uang serta kebijaksanaan moneter dalam perekonomian. Hanya saja peranan pemerintah lebih besar dibandingkan dengan kebijaksanaan moneter Bank Sentral. Dalam hal mekanisme transmisi, antara kedua kelompok ini telah ada kesepakatan terutama mengenai teori portofolio. Proses transmisi yang kemudian dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi (Nopirin, 1987:83).

Menurut Monetarist, pengaruh kebijaksanaan moneter terhadap permintaan agregat itu langsung. Artinya, tambahan uang kas itu tidak dibelikan surat berharga sehingga menyebabkan surat berharga naik atau tingkat bunga turun yang kemudian akan mendorong investasi, tetapi langsung dibelikan barang (substitusi antara uang dengan barang). Sedangkan Keynes berpendapat bahwa pengaruh kenaikan jumlah uang beredar terhadap kegiatan ekonomi itu tidak langsung, tetapi melalui beberapa

jalur dimana satu jalur adalah tingkat bunga. Kebijakan moneter yang ekspansif (penambahan jumlah uang yang beredar) akan menyebabkan penurunan tingkat bunga sehingga dapat mendorong investasi naik. Kenaikan harga surat berharga (berarti penurunan tingkat bunga) menyebabkan individu memperoleh individu tambahan kekayaan (*capital gain*). Tambahan kekayaan mendorong individu tersebut menambah konsumsi. Dengan demikian permintaan agregate itu tidak langsung dan kadang kala tidak pasti (Nopirin, 1987;86).

BAB III

METODOLOGI

3.1 Kerangka Konseptual

Pembangunan secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Sedangkan pembangunan ekonomi dimaksudkan sebagai aktivitas untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas moneter.

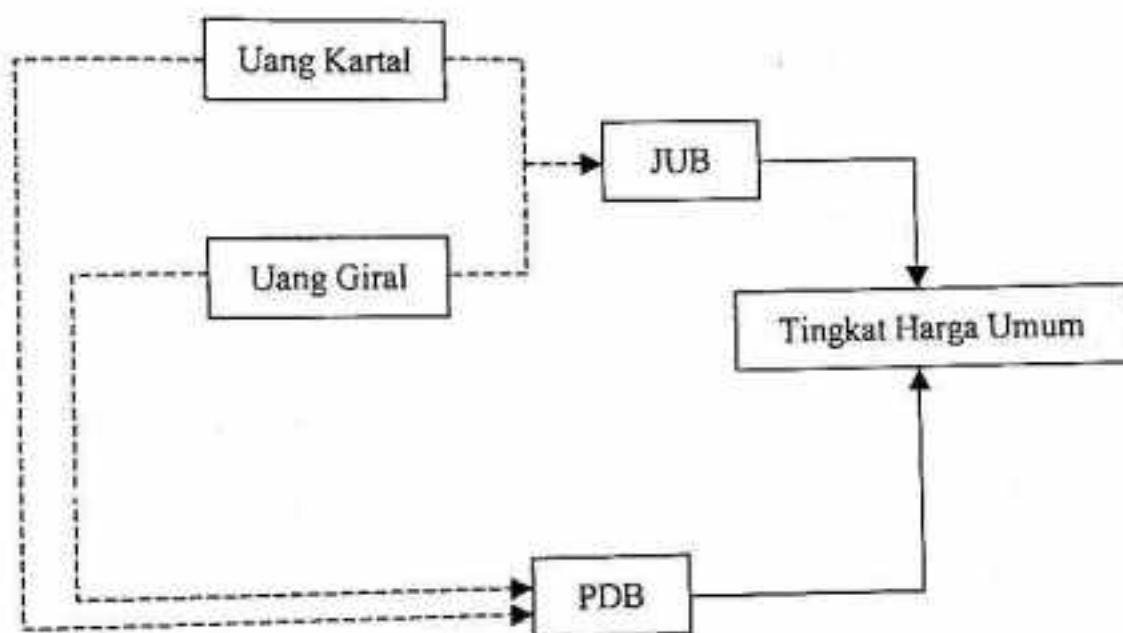
Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut, maka semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam hal ini stabilitas harga, mempunyai peranan yang turut menentukan naik turunnya tingkat harga. Jumlah uang beredar yang antara lain terdiri dari uang kartal dan uang giral merupakan faktor utama yang mempengaruhi stabilitas harga, khususnya indeks harga konsumen, sebab apabila jumlah uang beredar terlalu banyak atau melebihi permintaan riil masyarakat dan kapasitas produksi maka akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang.

Faktor lain yang dapat pula mempengaruhi tingkat harga umum adalah produk domestik bruto, dimana PDB ini berkaitan langsung dengan JUB bersama tingkat harga umum. Peningkatan JUB dan PDB selalu dibarengi dengan peningkatan indeks harga konsumen di Indonesia selama enam belas tahun terakhir.

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pengaruh JUB dan PDB terhadap tingkat harga umum, maka dapat dilihat pada skema dibawah ini :

Skema

Gambaran Umum Pengaruh JUB dan PDB Terhadap Tingkat Harga Umum



Keterangan : Garis lurus (→) merupakan hubungan fungsional
Garis putus (- ->) merupakan relasi yang tidak diamati dalam model

Dengan melihat kedua variabel (JUB dan PDB) tersebut maka akan timbul suatu permasalahan pokok tentang pengaruh dari kedua variabel tersebut terhadap tingkat harga umum, serta variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat harga umum, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab I. Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian dikemukakan tujuan dan kegunaan serta hipotesis yang digunakan. Kemudian untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakan maka akan digunakan suatu model analisis yaitu analisis regresi berganda. Dari regresi



berganda tersebut akan menunjukkan pengaruh JUB dan PDB terhadap tingkat harga umum serta faktor mana yang paling dominan mempengaruhi tingkat harga umum.

Untuk mendapatkan hasil yang baik tentang pengaruh jumlah uang beredar dan produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum di Indonesia maka dalam penulisan ini akan digunakan data 16 tahun terakhir, yaitu periode tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 ($n=16$). Periode tersebut dapat dinilai sebagai periode yang dapat memberikan pengaruh yang cukup baik dari variabel bebas terhadap tingkat harga umum di Indonesia.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia serta dari sumber-sumber lain.

Data kuantitatif adalah data yang disimbolkan dalam bentuk angka-angka (matematis), yaitu data yang berupa jumlah uang beredar, produk domestik bruto dan tingkat harga umum. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa keterangan-keterangan yang disimbolkan dalam bentuk deskripsi/konsep. Yaitu semua data yang digunakan sebagai penjelasan, baik berupa defenisi-defenisi maupun berupa keterangan dalam penulisan ini.

3.3 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian yang berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan sumber-sumber dari berbagai literatur, catatan kuliah dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini.

3.4 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu dengan menggunakan peralatan ekonometrika berupa regresi berganda, sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat maka dapat dilihat dari koefisien regresinya.

Dengan asumsi bahwa tingkat harga umum merupakan fungsi dari jumlah uang beredar dan produk domestik bruto :

$$Y = f(X_1, X_2)$$

Atau dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Cobb-Douglass, sebagai berikut (Yogianto, 1995;15) :

$$Y = b_0 X_1^{b_1} X_2^{b_2} e^{\mu}$$

Untuk melinierkan ketiga variabel tersebut maka digunakan Logaritma Natural (ln) dengan metode sebagai berikut :

$$\ln Y = \ln b_0 + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + \mu$$

di mana :

$$b_1 \geq 0, b_2 \geq 0$$

Y = Tingkat Harga Umum

X_1 = Jumlah Uang Beredar

X_2 = Produk Domestik Bruto

b_1, b_2 merupakan parameter dan b_0 adalah konstanta

e = Bilangan eksponensial

\ln = Logaritma Natural

μ = Error Term

Sebagai dasar pengambilan keputusan guna mengetahui tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi dari variabel bebas terhadap variabel terikat, maka akan digunakan pendekatan atau uji statistik sebagai berikut :

1. Uji Statistik t digunakan untuk menguji pengaruh atau variabel bebas terhadap variabel terikat, dimana variabel ini dikatakan signifikan jika t hitung sama dengan atau lebih besar dari nilai t yang terdapat dalam tabel.
2. Uji Statistik F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan dan dikatakan signifikan jika F hitung sama dengan atau lebih besar dari nilai F yang ada di tabel.

3.5 Batasan Variabel

Adapun yang menjadi batasan variabel dalam penulisan ini adalah:

1. JUB dalam arti sempit, yaitu JUB didefinisikan sebagai M_1 dan merupakan jumlah seluruh uang kartal yang dipegang oleh masyarakat (*The Non Bank*

Public) dan "*Demand Deposit*" yang dimiliki oleh perorangan pada bank-bank umum. Jadi M_1 dapat dituliskan = uang kartal - DD.

2. PDB merupakan keseluruhan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.
3. Tingkat Harga Umum adalah rata-rata semua harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2 Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia

Sebelum penulis menganalisa lebih jauh tentang hubungan dan pengaruh jumlah uang beredar, produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum di Indonesia, maka penulis mengawalinya dengan melihat perkembangan ketiga variabel tersebut selama periode 1983-1999.

4.1.1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar

Pada tabel IV.I memperlihatkan perkembangan jumlah uang beredar selama enam belas tahun terakhir yaitu selama periode 1983-1999. Perkembangan jumlah uang beredar tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dalam hal ini dapat dilihat dari perkembangan antara jumlah uang kartal dan uang giral.

Dengan melihat tabel IV.1, maka dapat dilihat jumlah uang giral lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah uang kartal. Penyebab utama dari peningkatan jumlah uang giral adalah adanya peningkatan pelayanan perbankan kepada para nasabah, sedangkan jumlah uang kartal mengalami peningkatan yang tidak terlalu tinggi dari tahun ke tahun karena adanya kecenderungan masyarakat untuk mengalihkan dananya dalam bentuk uang kuasi sehubungan dengan kenaikan suku bunga deposito berjangka dalam rupiah.

Pada tahun 1983 dan tahun 1984, perkembangan jumlah uang beredar tidak mengalami peningkatan yang terlalu tinggi yaitu Rp. 7.569 miliar pada tahun 1983

dan Rp 8.581 miliar pada tahun 1984. Sejak awal penelitian (1983), terlihat bahwa persentase peningkatan jumlah uang beredar mengalami penurunan, dari 15,56 persen pada tahun 1986 menjadi 8,63 persen pada tahun 1987. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijaksanaan uang kertas yang diambil oleh pemerintah pada tahun 1987.

Pada tahun 1989 jumlah uang beredar mengalami peningkatan yang cukup berarti, hingga mencapai angka sebesar Rp 20.094 milyar, yang jika dibandingkan pada tahun sebelumnya (1988) yang hanya sebesar Rp 14.392 milyar. Perubahan peredaran uang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain aktiva luar negeri, tagihan pada perusahaan-perusahaan dan perorangan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran uang tersebut dapat dilihat pada tabel IV.2. Jadi peningkatan jumlah uang beredar pada tahun 1989 disebabkan oleh peningkatan aktiva luar negeri sebesar Rp 409 milyar dan tagihan pada perusahaan-perusahaan dan perorangan sebesar Rp 22.132 milyar, hal ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka sebesar Rp 11.069 milyar untuk tagihan pada perusahaan dan perorangan.

Pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1991 terjadi peningkatan jumlah uang beredar dari Rp 23.819 milyar pada tahun 1990 menjadi Rp 26.341 milyar pada tahun 1991, atau mengalami pertumbuhan jumlah uang beredar sebesar 10,59 persen. Pertambahan uang beredar yang terjadi pada tahun 1991 berkaitan dengan penurunan tingkat bunga tabungan dan deposito berjangka yang kurang menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank, serta adanya kecenderungan pemberian jasa giro

yang lebih tinggi pada saat itu dan bertepatan dengan penutupan tahun anggaran dan perayaan hari besar keagamaan. Kegiatan menyambut perayaan hari besar keagamaan tersebut menyebabkan penambahan transaksi pada tingkat perdagangan eceran yang banyak menggunakan uang kertas dan uang logam.

Jumlah uang beredar pada tahun 1992 mengalami pertumbuhan sebesar 9,26 persen atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 28.781 milyar, sedangkan tahun sebelumnya hanya Rp. 26.341 milyar. Adapun faktor yang mempengaruhi peredaran uang tersebut semakin meningkat, antara lain adanya peningkatan tagihan pada lembaga-lembaga dan perusahaan pemerintah dari Rp. 105 milyar pada tahun 1991 menjadi Rp. 492 miliar pada tahun 1992.

Tahun 1993 persentase kenaikan jumlah uang beredar di Indonesia kembali mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu menjadi 27,88 persen atau Rp. 36.805 milyar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan uang untuk keperluan transaksi baik dipasar barang maupun dipasar modal. Selain itu kenaikan ini dipengaruhi juga oleh adanya peningkatan tagihan pada perusahaan-perusahaan dan perorangan sebesar Rp. 30.230 milyar pada tahun 1993 dan jauh lebih kecil dibandingkan tahun 1992 yang hanya sebesar Rp. 15.257 milyar.

Tahun 1994 sampai tahun 1995 jumlah uang mengalami penambahan yang beredar sebesar Rp 45.374 milyar pada tahun 1994 dan menjadi Rp 52.677 milyar pada tahun 1995. Bertambahnya jumlah uang beredar pada tahun 1994 disebabkan

oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang dipengaruhi oleh semakin berkembangnya fasilitas-fasilitas perbankan misalnya *Automatic Teller Machine* (ATM) dan peningkatan kegiatan perdagangan besar transaksinya menggunakan uang tunai sehingga mendorong bertambahnya uang beredar.

Tahun 1995 – 1996 jumlah uang beredar mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar Rp. 64.089 milyar jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu Rp. 52.677 milyar. Peningkatannya yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh semakin meningkatnya aktiva luar negeri sebesar Rp. 18.015 milyar pada tahun 1996 dan tagihan perusahaan-perusahaan dan perorangan sebesar 51.768 milyar, yang mana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (1995) yang hanya Rp. 7.354 milyar pada aktiva luar negeri, angka ini jauh lebih kecil jika pada tahun 1996 dan tagihan pada perusahaan-perusahaan dan perorangan hanya sebesar Rp. 47.504 milyar pada tahun 1995.

Pada tahun 1996-1997 peningkatan jumlah uang beredar tidak terlalu tinggi dari jika dibandingkan dengan tahun 1998 sampai tahun 1999. Tahun 1996-1997 peningkatannya dari Rp. 64.089 milyar dengan perubahan pertumbuhannya hanya 21,66 persen menjadi Rp. 78.345 milyar, yang berubah 22,44 persen. Kenaikan ini disebabkan kebutuhan akan yang lebih besar untuk melakukan transaksi sebagai akibat tingginya kenaikan tingkat harga sehingga mendorong masyarakat untuk memilih alat pembayaran yang lebih likuid. Peningkatan permintaan terhadap uang kartal, terus meningkat setelah pencabutan izin usaha, bank pada awal bulan

November 1997. Selain itu peningkatan jumlah uang beredar 1996-1997 dipengaruhi juga oleh adanya peningkatan tagihan pada perusahaan-perusahaan dan perorangan, yaitu pada tahun 1996 Rp. 51.768 milyar dan Rp. 132.031 milyar pada tahun 1997.

Sedangkan pada tahun 1998-1999 jumlah uang beredar mengalami perubahan 29,17 persen atau meningkat tajam dari Rp. 101.197 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 124.633 milyar dan mengalami perubahan 23,16 pada tahun 1999. Hal ini disebabkan masih digunakannya uang kartal, oleh masyarakat untuk kegiatan transaksi yang lebih besar akibat tingkat harga yang tinggi dan adanya "rush" atau penarikan simpanan perbankan besar-besaran oleh nasabah akibat rencana pengumuman penutupan bank swasta yang kekurangan likuiditasnya serta belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.



TABEL IV.1
PERKEMBANGAN JUMLAH UANG BEREDAR (M₁)
TAHUN 1983 - 1999
(MILYAR RUPIAH)

TAHUN	UANG KARTAL	UANG GIRAL	JUB (M1)	PERTUMBUHAN (%)
1983	3.333	4.236	7.569	-
1984	3.712	4.869	8.581	13,37
1985	4.440	5.669	10.109	17,81
1986	5.338	6.339	11.677	15,51
1987	5.782	6.903	12.685	8,63
1988	6.246	8.146	14.392	13,46
1989	7.426	12.668	20.094	39,62
1990	9.094	14.725	23.819	18,54
1991	9.346	16.995	26.341	10,59
1992	11.478	17.303	28.781	9,26
1993	14.431	22.374	36.805	27,88
1994	18.634	26.740	45.374	23,28
1995	20.807	31.870	52.677	16,10
1996	22.487	41.602	64.089	21,66
1997	28.426	49.919	78.345	22,24
1998	41.394	59.803	101.197	29,17
1999	58.353	66.280	124.633	23,16
*	270.727	396.441	667.168	

➤ *) Jumlah total selama tahun pengamatan
➤ Sumber : BI-Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (berbagai seri)
Data diolah

TABEL IV.2
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UANG BEREDAR DI INDONESIA
PERIODE 1983 - 1999

SEBAB-SEBAB PERUBAHAN	T A H U N																
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Aktiva luar negeri	3,243	3,654	1,813	1,841	2,442	-523	409	-2,171	7,43	7,082	-934	-4,428	7,354	18,015	17,344	74,212	-13,101
Tagihan pada sektor Pemerintahan	-1,506	-3,359	-278	498	1,539	229	-1,175	-3,877	-1,356	-1,291	-731	-4,696	-7,472	-2,757	-16,486	17,542	425,258
Tagihan pada lembaga-lembaga dan perusahaan pemerintahan pusat	104	190	513	253	730	659	1,444	-921	105	492	492	-485	1,305	4,626	5,031	6,389	-10,471
Tagihan pada perusahaan-perusahaan dan perancangan	2,331	3,646	3,334	4,544	6,245	11,069	22,132	35,809	20,283	15,257	30,23	37,845	47,504	51,768	132,031	49,879	245,865
Jaminan impor	-7	-10	-20	-20	-22	-260	52	-416	82	76	-809	158	-238	-320	680	-998	759
Lainnya	584	-857	-166	-2,628	-4,732	-3,316	-8,103	-2,498	-12,013	-1,522	-5,383	1,064	-565	-5,658	-70,909	37,367	-50,449

Sumber : Statistik Keuangan - Bank Indonesia

4.1.2 Perkembangan Produk Domestik Bruto

Secara keseluruhan hasil-hasil pembangunan, tercermin pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari Produk Domestik Bruto, baik yang dihitung atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan untuk melihat perkembangan PDB dalam penulisan ini, maka PDB diklasifikasikan menurut lapangan usaha dan berdasarkan atas dasar harga konstan 1993.

Penggantian tahun dasar yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik merupakan reklasifikasi sektor pada tahun dasar yang lama (1983) ke tahun dasar yang baru (1993). Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan adalah sebelas sektor pada tahun dasar lama, sedangkan pada tahun dasar yang baru digunakan sembilan sektor.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam perubahan tahun dasar adalah (Widodo, 1991:23) :

$$PDB_{HK} = \frac{100}{IHK_x} PDB_{HB_x}$$

dimana :

PDB	=	Produk Domestik Bruto
HK	=	Harga konstan
HB	=	Harga berlaku
IHK	=	Indeks Harga Konsumen
100	=	IHK Tahun Dasar
x	=	Tahun tertentu

Pada tabel IV.3, terlihat pertumbuhan PDB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode tahun 1983-1999. Pada tahun 1983 perkembangan PDB sebesar Rp. 73.697,0 milyar dan pada tahun 1984 sebesar Rp. 82.475,7 milyar, hal ini berarti terjadi kenaikan 11,9 persen dan ini sekaligus merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dicapai Indonesia sampai pada saat ini. Tingginya angka tersebut dapat dipahami dengan mengingat penerimaan dari minyak masih dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1985-1989 rata-rata perubahan PDB dalam jangka waktu 5 tahun adalah 6,76 persen. Perubahan PDB agak lambat karena masa bonanza minyak telah sirna. Pada tahun 1989 laju pertumbuhan PDB meningkat menjadi 7,5 persen. Dilihat dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan PDB pada tahun 1989 tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan dalam negeri terutama investasi dan konsumsi pemerintah, serta masih tingginya permintaan luar negeri khususnya ekspor non migas yang terus menunjukkan peningkatan, meskipun dalam beberapa tahun mengalami laju pertumbuhan yang agak lambat. Sedangkan dilihat dari sisi produksi, lebih tingginya laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh semakin mantapnya pertumbuhan baik sektor non migas maupun sektor migas.

Pada tahun 1990 perkembangan PDB sebesar Rp. 115.110,1 milyar dengan laju pertumbuhannya masih cukup tinggi yakni sebesar 7,1 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut terutama sebagai hasil dari serangkaian kebijaksanaan penyesuaian yang ditempuh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat

Pada tabel IV.3, terlihat pertumbuhan PDB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode tahun 1983-1999. Pada tahun 1983 perkembangan PDB sebesar Rp. 73.697,0 milyar dan pada tahun 1984 sebesar Rp. 82.475,7 milyar, hal ini berarti terjadi kenaikan 11,9 persen dan ini sekaligus merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dicapai Indonesia sampai pada saat ini. Tingginya angka tersebut dapat dipahami dengan mengingat penerimaan dari minyak masih dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1985-1989 rata-rata perubahan PDB dalam jangka waktu 5 tahun adalah 6,76 persen. Perubahan PDB agak lambat karena masa bonanza minyak telah sirna. Pada tahun 1989 laju pertumbuhan PDB meningkat menjadi 7,5 persen. Dilihat dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan PDB pada tahun 1989 tersebut disebabkan oleh meningkatnya permintaan dalam negeri terutama investasi dan konsumsi pemerintah, serta masih tingginya permintaan luar negeri khususnya ekspor non migas yang terus menunjukkan peningkatan, meskipun dalam beberapa tahun mengalami laju pertumbuhan yang agak lambat. Sedangkan dilihat dari sisi produksi, lebih tingginya laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh semakin mantapnya pertumbuhan baik sektor non migas maupun sektor migas.

Pada tahun 1990 perkembangan PDB sebesar Rp. 115.110,1 milyar dengan laju pertumbuhannya masih cukup tinggi yakni sebesar 7,1 persen. Tingginya pertumbuhan tersebut terutama sebagai hasil dari serangkaian kebijaksanaan penyesuaian yang ditempuh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat

meningkatkan peranan sektor-sektor swasta. Sejalan dengan membaiknya iklim berusaha, yang dapat meningkatkan peranan sektor swasta terutama terdapat pada sektor industri pengolahan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi tahun 1990 ditandai dengan pesatnya pertumbuhan permintaan dalam negeri, sedangkan sektor luar negeri bersih mengalami penurunan. Bersama dengan itu, impor juga mengalami peningkatan yang tinggi yang antara lain berkaitan dengan makin meningkatnya investasi. Sementara itu pertumbuhan ekspor hanya mengalami sedikit peningkatan antara lain karena menurunnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri dan menurunnya harga komoditi primer.

Pada tahun 1991 laju pertumbuhan PDB kembali menunjukkan penurunan yang hanya sebesar 6,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ada kaitannya dengan musim kemarau sehingga produksi hasil pertanian menjadi sangat berkurang. Disamping itu dampak kebijaksanaan moneter yang ketat yang mulai dirasakan di sektor industri manufaktur dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1992, kembali mengalami penurunan setelah pada tahun 1991 pertumbuhan PDB turun menjadi 6,1 persen dari 6,6 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDB pada tahun 1992 ini masih didukung oleh beberapa sektor usaha. Terutama didukung oleh masih tingginya pertumbuhan produksi di sektor industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran (lihat tabel IV.5). Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian yang mengalami peningkatan pada tahun 1992 juga turut menunjang pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi. Perlu dikemukakan bahwa industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam dekade terakhir, sehingga struktur perekonomian secara berangsur-angsur telah mengalami pergeseran dan dominasi pertanian menjadi dominasi industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sektor industri pengolahan dimana mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu sebesar 9,9 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1991, yaitu 9,8 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi oleh laju pertumbuhan yang tetap tinggi pada sub sektor industri pengolahan non migas dibanding dengan migas.

Untuk mencapai stabilitas perekonomian makro yang mantap serta untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pemulihan kegiatan ekonomi maka stabilisasi moneter dengan menurunkan tingkat suku bunga dan menyempurnakan ketentuan dalam prinsip kehati-hatian yang mendorong peningkatan kredit perbankan, sebagai hasilnya pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 7,0 persen pada tahun 1993 yang terutama didukung oleh menguatnya permintaan dalam negeri, baik konsumsi maupun investasi. Mantapnya faktor-faktor fundamental pada tahun 1993 terus berlanjut pada tahun 1994.

Pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditunjukkan oleh PDB atas dasar harga konstan 1993 mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1994 adalah 7,5 persen. Pertumbuhan ini merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu yang lalu, yang antara lain promosi investasi swasta yang cukup tinggi dan pengaruh paket

deregulasi Oktober 1993 yang antara lain memperlancar perizinan dibidang penanaman modal. Secara sektoral, sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi diatas 10 persen, yaitu sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, dan bangunan. Tingginya tingkat pertumbuhan ini akibat permintaan domestik yang cukup kuat. Sedangkan sektor-sektor lainnya tumbuh lebih moderat yaitu diatas 5 persen, kecuali sektor jasa-jasa dan sektor pertanian masing-masing 2,5 persen dan 0,6 persen.

Pada tahun 1995 perkembangan PDB tumbuh sebesar 8,2 persen, yang jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari pengaruh musim dan kebijakan pemerintah. Salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi tahun 1995 adalah karena meningkatnya sektor pertanian yang meningkat cukup pesat dari 0,6 persen di tahun 1994, menjadi 4,4 persen di tahun 1995, karena cuaca yang baik.

Pada tahun 1996 pertumbuhan PDB sedikit menurun, yaitu sebesar 7,8 persen, namun masih diatas target. Penurunan ini sebagai akibat dari pengaruh kebijakan keuangan yang diambil pemerintah yang diarahkan pada pengurangan pengeluaran masyarakat, karena defisit berjalan kian membesar. Besarnya defisit transaksi berjalan dikarenakan besarnya defisit disektor jasa-jasa, yang mencapai tiga lebih dibandingkan surplus perdagangan. Penyumbang utama antara lain karena besarnya biaya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Pada tahun 1996 mencapai sekitar Rp. 3 milyar. Pengeluaran jauh melebihi penerimaan TKI yang bekerja diluar

negeri yaitu sekitar Rp. 500 milyar. PDB pada tahun 1997 mengalami perubahan yang cukup drastis sebesar 4,7 persen, dimana faktor penyebabnya adalah gejolak moneter yang menimbulkan krisis ekonomi.

Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami kemunduran, dimana laju pertumbuhan PDB minus 13,1 persen. Pada tahun 1998 ini hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, sehingga mempengaruhi sendi-sendi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari anjloknya nilai PDB tahun 1998 menjadi Rp. 376.375,0 milyar. Bila dilihat dari keadaan per sektor yang sebagian besar mengalami pertumbuhan yang negatif, maka satu sektor yang merupakan kontribusi terkecil atas pembentukan PDB, namun mengalami pertumbuhan yang paling besar yaitu sektor listrik, gas dan air minum. Seperti ketika negeri ini dilanda krisis yang hebat pada tahun 1998, sektor ini masih tetap tumbuh positif yaitu sebesar 3,0 persen sementara pertumbuhan sektor-sektor yang lain adalah negatif.

Pada tahun 1999 pertumbuhan PDB telah mengalami pertumbuhan yang sedikit membaik yaitu sebesar Rp. 380.096,9 milyar atau dengan perubahan 10 persen. Hal ini berbeda pada tahun 1998 dimana hampir seluruh mengalami pertumbuhan negatif, namun pada tahun 1999 dari sembilan sektor yang dibahas dalam PDB terayata tinggal tiga sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1999, sektor-sektor tersebut adalah pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan minus 2,4 persen, sektor perdagangan minus 0,8 persen dan sektor keuangan dan persewaan minus 7,5 persen. Sementara sektor ekonomi yang

mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 1999 adalah sektor listrik, gas dan air minum dengan laju pertumbuhan sekitar 8,3 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun 1999 kondisi ekonomi Indonesia sedikit membaik, dan seluruh sektor berhasil bangkit kembali dengan laju pertumbuhan positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan dan persewaan.

TABEL IV.3
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB)
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1983-1999
(MILYAR RUPIAH)

TAHUN	PDB	PERTUMBUHAN (%)
1983	73.697,0	-
1984	82.475,7	11,9
1985	84.503,9	2,5
1986	89.523,3	5,9
1987	93.758,8	4,7
1988	99.981,3	6,6
1989	107.436,5	7,5
1990	115.110,1	7,1
1991	122.727,0	6,6
1992	130.210,0	6,1
1993*	329.991,1	7,0
1994*	354.640,8	7,5
1995*	383.792,3	8,2
1996*	413.797,9	7,8
1997*	433.246,0	4,7
1998*	376.375,0	-13,1
1999*	380.096,9	1,0

➤ *) Atas dasar harga konstan tahun dasar 1993
 ➤ Sumber : BI- Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (berbagai seri)
 Data diolah

TABEL IV.4
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1983-1999
(MILYAR RUPIAH)

TAHUN	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN	INDUSTRI	LISTRIK, GAS, DAN AIR MINUM	BANGUNAN	PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	KEUANGAN DAN PERSEWAAN	JASA-JASA LAINNYA	JUMLAH
1983	17.696,0	13.968,0	8.211,0	524,0	4.597,0	12.009,0	3.978,0	4.001,0	8.713,0	73.697,0
1984	18.431,1	17.120,1	12.078,8	324,0	4.393,8	11.793,0	4.008,1	5.213,3	9.113,5	82.475,7
1985	19.209,0	15.480,4	13.430,5	360,9	4.508,0	12.388,5	4.031,8	5.459,5	9.635,3	84.503,9
1986	19.698,7	16.308,6	14.678,1	429,8	4.609,0	13.430,3	4.178,1	6.010,0	10.160,7	89.523,3
1987	20.136,4	16.365,5	16.235,3	494,6	4.802,9	14.357,8	4.393,7	6.184,4	10.788,2	93.758,8
1988	21.213,7	15.892,8	18.182,3	548,9	5.259,1	15.656,9	5.211,5	6.514,4	11.501,7	99.981,3
1989	21.917,8	16.663,8	19.855,7	615,6	5.878,0	17.338,1	5.811,4	7.168,4	12.187,7	107.436,5
1990	22.356,9	17.488,8	22.276,7	725,7	6.672,9	18.564,5	6.367,9	7.892,6	12.764,1	115.110,1
1991	22.657,2	19.108,2	24.461,2	842,8	7.403,3	19.557,3	6.816,2	8.636,9	13.243,9	122.727,0
1992	23.481,3	19.585,0	26.880,0	900,0	8.055,0	20.955,3	7.300,0	9.250,0	13.803,7	130.210,0
1993*	58.963,4	31.497,3	73.556,3	3.290,2	22.512,9	55.512,9	23.248,9	28.047,8	33.361,4	329.991,1
1994*	59.291,2	33.261,6	82.649,0	3.702,7	25.857,5	59.504,1	25.188,6	30.901,0	34.285,1	354.640,8
1995*	61.885,2	35.502,2	91.637,1	4.291,9	29.197,8	64.230,8	27.328,6	34.313,0	35.405,7	383.792,3
1996*	63.827,8	37.739,4	102.259,7	4.876,8	32.923,7	69.475,0	29.701,1	36.384,2	36.610,2	413.797,9
1997*	64.468,0	38.538,2	107.629,7	5.479,9	35.346,4	73.523,8	31.782,5	38.543,0	37.934,5	453.246,0
1998*	63.609,5	37.474,0	95.320,6	5.646,1	22.465,3	60.130,7	26.975,1	28.278,7	36.475,0	376.375,0
1999*	65.339,1	36.571,8	98.949,4	6.112,9	22.825,5	60.195,1	26.772,1	26.147,0	37.184,0	380.096,9

* Atas dasar harga konstan tahun dasar 1993
 Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia (berbagi tahun)
 Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (berbagi seri)

Data diolah

TABEL IV.5
PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1983-1999

TAHUN	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN (%)	PERTAMBANGAN DAN PENGGAJIAN (%)	INDUSTRI (%)	LISTRIK, GAS, DAN AIR MINUM (%)	BANGUNAN (%)	PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN (%)	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI (%)	KEUANGAN DAN PERSEWAAN (%)	JASA-JASA LAINNYA (%)
1983	-	-	47,1	-38,2	-4,4	-1,8	0,8	30,3	3,9
1984	4,2	22,6	11,2	11,4	2,6	5,0	0,6	4,7	2,0
1985	4,2	-9,6	9,3	19,1	2,2	8,6	3,6	10,1	3,7
1986	2,5	5,3	10,6	15,1	4,2	6,7	5,2	2,9	3,7
1987	2,2	0,3	12,0	11,0	9,5	9,0	18,6	5,3	4,3
1988	5,4	-2,9	9,2	12,2	11,8	10,7	11,5	10,0	6,2
1989	3,3	4,9	12,2	17,9	13,5	7,1	9,6	10,1	5,0
1990	2,0	5,0	9,8	16,1	10,9	5,3	7,0	9,4	5,3
1991	1,3	9,3	9,9	6,8	8,8	7,1	7,1	7,1	7,1
1992	3,6	2,5	10,2	10,1	11,3	7,0	8,0	9,2	1,5
1993*	0,5	3,5	12,4	12,5	14,9	7,2	8,3	10,2	2,8
1994*	0,6	5,6	10,9	15,9	12,9	7,9	8,5	11,0	3,3
1995*	4,4	6,7	11,6	13,6	12,8	8,2	8,7	6,0	3,4
1996*	3,1	6,3	5,3	12,4	7,4	5,8	7,0	5,9	3,6
1997*	1,0	2,1	-11,4	3,0	-36,4	-18,2	-15,1	-26,6	-3,8
1998*	-1,3	-2,8	3,8	8,3	1,6	0,1	-0,8	-7,5	1,9
1999*	2,7	-2,4							

*) Atas dasar harga konstan tahun dasar 1993
 > Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia (berbagai edisi)
 Data diolah

4.1.3 Perkembangan Tingkat Harga Umum

Pada tabel IV.6, disajikan data perkembangan tingkat harga umum di Indonesia pada tahun 1983 sampai pada tahun 1999. Perkembangan tingkat harga umum (THU) terkait langsung dengan jumlah yang beredar, produk domestik bruto dan laju inflasi. Tingkat harga umum selama periode 1983-1999 mengalami fluktuasi sesuai dengan perubahan yang terjadi pada jumlah uang beredar, produk domestik bruto serta laju dan inflasi di Indonesia. Tingkat harga umum merupakan cerminan dari harga eceran sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat atau dengan kata lain merupakan indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan 27 ibukota provinsi di Indonesia.

Pada tahun 1990 THU mengalami perubahan perhitungan dimana pada tahun sebelum 1990 THU dihitung berdasarkan gabungan 17 kota, sedangkan tahun 1990-1999 dihitung berdasarkan gabungan 27 ibukota provinsi di Indonesia.

Pada awal masa pengamatan yakni tahun 1983 THU sebesar 221,53 dan pada tahun 1984 meningkat menjadi 241,63. Peningkatan tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah uang beredar pada tahun 1984 sebesar Rp. 8.581 milyar yang jika dibandingkan tahun sebelumnya hanya mencapai angka sebesar Rp. 7.569 milyar. Sedangkan laju inflasi dari tahun 1983 sampai pada tahun 1984 mengalami penurunan yang tajam, yaitu dari 11,46 persen menjadi 8,76 persen (lihat tabel IV.7). Menurunnya tingkat inflasi tersebut disebabkan oleh cukup tersedianya barang-barang konsumsi dan dipertahankannya harga BBM yang ditunjang oleh kebijaksanaan

pemerintah dibidang moneter dan fiskal. Selain hal itu pada tahun 1983 pemerintah Indonesia mengeluarkan paket deregulasi perbankan untuk menaikkan tabungan masyarakat sebab ingin mengurangi ketergantungan pada ekspor migas karena pada saat itu terjadi oil shock, sehingga inflasinya 0.96%.

Pada tahun 1985 THU mengalami peningkatan sebesar 257,20 dan pada tahun 1986 meningkat menjadi 275,27. Peningkatan THU ini diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah uang beredar pada tahun 1986 sebesar Rp. 11.677 milyar dan jumlah PDB sebesar Rp.89.523,3 milyar. Namun laju inflasi mengalami penurunan pada tahun 1985 yaitu 4,31 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kebijakan uang ketat pemerintah dalam mengendalikan harga-harga. Kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1986, laju inflasi kembali naik sebesar 8,83 persen, lalu meningkat tipis 8,90% pada tahun berikutnya (1987).

Pada tahun 1988-1989 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sejalan dengan adanya peningkatan yang sangat besar pada PDB dan laju inflasi mengalami penurunan menjadi 5,47 persen dan 5,97 persen pada tahun 1988 dan 1989. Hal ini disebabkan penyesuaian harga komoditi-komoditi pokok dan tarif listrik yang merupakan paket kebijakan 21 November 1988 dalam sektor perdagangan, angkutan laut, industri dan sektor pertanian.

Tahun 1990 THU sebesar 116,98 sedangkan laju inflasi sebesar 9,93 persen, hal ini terjadi akibat kelebihan uang beredar dibanding output nasional, sehingga terjadi kenaikan harga. Tahun 1991 peningkatan jumlah uang beredar memberikan

peluang untuk terjadinya inflasi dari THU sebesar 128,60 dan ternyata inflasi yang terjadi 9,52 persen. Pada tahun 1990 pemerintah menetapkan kebijakan untuk menekan laju inflasi yaitu dengan menetapkan kebijaksanaan uang ketat dengan ciri tingkat suku bunga yang tinggi dan terbatasnya akses pada kredit. Kemudian pada tahun 1992 THU tidak mengalami perkembangan yang terlalu tinggi dan sejalan dengan turunnya laju inflasi pada tahun 1992 yang mencapai angka sebesar 4,94 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya THU kelompok makanan serta penurunan pada THU kelompok sandang.

Pada tahun 1993 THU sebesar 148,83 diikuti dengan meningkatnya jumlah uang beredar sebesar Rp. 36.805 milyar dan jumlah PDB sebesar Rp. 329.991,1 milyar. Peningkatan THU ini juga dipengaruhi oleh laju inflasi 9,77 persen. Inflasi yang kembali naik pada tahun ini menunjukkan akibat dari perorangan subsidi BBM yang diikuti dengan kenaikan tarif listrik kemudian menyebabkan harga-harga komoditi juga naik. Kemudian pada tahun 1994-1995 THU terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sejalan dengan adanya peningkatan yang besar pada PDB dan laju inflasi sebesar 9,24 persen dan 8,64 persen pada tahun 1995. Kenaikan THU pada tahun 1994-1995 juga disebabkan oleh semakin meningkatnya THU pada sektor makanan dan sandang.

Tahun 1996 sampai 1997 THU naik dan 189,62 menjadi 211,62 yang berarti laju inflasi juga meningkat dari 6,47 persen menjadi 11,05 persen yang disertai oleh peningkatan jumlah uang beredar dalam negeri yang tinggi serta terganggunya proses

produksi dan distribusi, sehingga inflasi yang terjadi pada tahun 1996 sampai 1997 ini termasuk inflasi tarikan permintaan.

Tahun 1998 THU sebesar 198,47 dengan laju inflasi 77,63% berarti mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga mendorong peningkatan harga barang-barang impor dan mempengaruhi peningkatan harga barang yang tidak diimpor. Inflasi yang terjadi pada tahun 1998 merupakan dampak dari kemarau panjang, kebakaran hutan dan gejolak sosial politik yang memburuk seperti kerusuhan diberbagai tempat di Indonesia dan utang luar negeri serta faktor non ekonomi lainnya.

Pada tahun 1999 perkembangan THU sebesar 202,45 mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah uang beredar Rp 124 633 milyar. Hal ini berkaitan dengan laju inflasi yang tampak menurun dari tahun sebelumnya yaitu 8,84 persen. Terjadinya penurunan inflasi pada tahun 1999 ini dipengaruhi oleh adanya stabilitas nilai tukar, seiring membaiknya kondisi ekonomi, penurunan tingkat suku bunga serta dampak dari adanya harapan masyarakat terhadap tanda-tanda pemulihan ekonomi dengan kucuran dana dari IMF.

TABEL IV.6
TINGKAT HARGA UMUM DI INDONESIA
(GABUNGAN 27 KOTA)

TAHUN	TINGKAT HARGA UMUM
1983	221,53
1984	241,63
1985	252,30
1986	275,27
1987	300,75
1988	317,56
1989	336,96
1990	116,98
1991	128,60
1992	135,08
1993	148,83
1994	163,17
1995	177,83
1996	189,62
1997	211,62
1998	198,47
1999	202,45

Sumber : Statistik Keuangan – Bank Indonesia

TABEL IV.7
LAJU INFLASI DI INDONESIA
TAHUN 1983 - 1999

TAHUN	LAJU INFLASI (%)
1983	11,46
1984	8,76
1985	4,31
1986	8,83
1987	8,90
1988	5,47
1989	5,97
1990	9,53
1991	9,52
1992	4,94
1993	9,77
1994	9,24
1995	8,64
1996	6,47
1997	11,05
1998	77,63
1999	8,84

Sumber : Statistik Keuangan – Bank Indonesia

4.2 Hasil Empirik Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto terhadap Tingkat Harga Umum

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya, yaitu bahwa jumlah uang beredar dan produk domestik bruto mempengaruhi tingkat harga umum di Indonesia, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Dengan menggunakan data tahun 1983-1999 tentang jumlah uang beredar dan produk domestik bruto yang merupakan variabel bebas dan tingkat harga umum sebagai variabel terikat, maka hasil perhitungan analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai berikut :

$$Y = 4,1385 + 0,7644 \ln X_1 + 0,2288 \ln X_2$$

(8,259) (1,977)

$$R = 0,9917$$

$$R^2 = 0,9835$$

$$R^2 \text{ Adjusted} = 0,9812$$

$$F = 418,105$$

Angka dalam kurung menunjukkan nilai T

Berdasarkan hipotesa pertama yang diajukan, regresi diatas menunjukkan bahwa selama periode pengamatan 1983 - 1999, koefisien jumlah uang beredar memperlihatkan tanda positif, berarti jumlah uang beredar mempunyai korelasi positif terhadap tingkat harga umum. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi jumlah uang yang beredar sebesar 0,7644, artinya apabila jumlah uang beredar



meningkat sebesar 1 persen, maka tingkat harga umum akan meningkat pula sebesar 0,7644 persen. Hasil regresi dari ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa antara jumlah uang beredar dan tingkat harga umum signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 8,259 dimana nilai ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai t yang terdapat dalam tabel yaitu 2,977 pada tingkat keyakinan 5 persen dan derajat bebas 14.

Sedangkan produk domestik bruto juga mempunyai korelasi positif terhadap tingkat harga umum, hal ini dapat dilihat koefisien regresi produk domestik bruto sebesar 0,2288, artinya apabila produk domestik bruto meningkat 1 persen, maka tingkat harga umum akan turun sebesar 0,2288 persen. Hasil regresi dari ketiga harga variabel diatas menunjukkan bahwa antara produk domestik bruto dan tingkat harga umum adalah tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 1,977 di mana nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai t yang terdapat dalam tabel yaitu 2,977 pada tingkat keyakinan 5 persen dengan derajat bebas 14.

Untuk melihat keeratan hubungan dan variasi sumbangan antara jumlah uang yang beredar dan produk domestik bruto dengan tingkat harga umum, maka digunakan koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (R^2), dimana koefisien korelasi sebesar 0,9917 dan koefisien determinasi sebesar 0,9835. Angka ini menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar dan produk domestik bruto mempunyai hubungan yang cukup erat terhadap variabel tingkat harga umum. Harga koefisien korelasi (R) sebesar 0,9917 menunjukkan bahwa cukup eratnya hubungan antara variabel terikat selama tahun pengamatan 1983 - 1999. Sedangkan angka

koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9835 menunjukkan bahwa sumbangan yang diberikan oleh variabel jumlah uang beredar dan produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum adalah sebesar 98,35 persen dan sekitar 1,65 persen merupakan sumbangan dari faktor lain.

Secara uji t statistik menunjukkan pengaruh yang signifikan antara variabel jumlah uang beredar dan produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum, dan jika dilihat secara keseluruhan nampaknya mempunyai hubungan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan pengujian uji F yang menunjukkan angka sebesar 418,105 di mana nilai jauh lebih besar dari nilai F yang terdapat pada tabel yaitu sebesar 3,74 pada tingkat signifikan 5 persen. Sedangkan pada tingkat 1 persen, nilai uji F sebesar 418,105 juga jauh lebih besar dari nilai F tabel yaitu 6,15.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, tentang pengaruh jumlah uang beredar dan produk domestik bruto terhadap tingkat harga umum di Indonesia selama periode 1983 – 1999, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama periode pengamatan, jumlah uang beredar mempunyai korelasi positif terhadap tingkat harga umum, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi jumlah uang beredar sebesar 0,7644, artinya apabila jumlah uang beredar meningkat 1 persen maka tingkat harga umum akan meningkat sebesar 0,7644 persen. Dari hasil ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa antara jumlah uang beredar dan tingkat harga umum adalah signifikan. Hal ini dapat kita lihat dari nilai t hitung sebesar 8,259 yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu 2,977 pada tingkat keyakinan 5 persen dan derajat bebas 14.
2. Produk domestik bruto juga memperlihatkan korelasi yang negatif terhadap tingkat harga umum, hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi produk domestik bruto sebesar 0,2288 artinya apabila produk domestik bruto meningkat 1 persen, maka tingkat harga umum akan menurun sebesar 0,2288 persen dan regresi dari ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa antara produk domestik bruto dan tingkat harga umum tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung



sebesar 1,977 yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu 2,977 pada tingkat keyakinan 5 persen dengan derajat bebas 14.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, pembahasan pembuktian hipotesis dan analisis dari ketiga variabel tersebut, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengoreksi kenaikan harga adalah lebih tepat jika ditinjau secara satu persatu, yaitu jumlah uang beredar dengan tingkat harga umum atau antara produk domestik bruto dengan tingkat harga umum.
2. Untuk menjamin kestabilan harga, kiranya perlu perhatian terhadap pengendalian tingkat harga komoditi utama, yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat seperti BBM ataupun beras dan sebagainya. Karena hal tersebut akan langsung dirasakan pengaruhnya terhadap kenaikan tingkat harga umum (indeks harga konsumen), jika secara drastis mengalami kenaikan.
3. Untuk masa akan datang variabel Produk Domestik Bruto selama periode 1983-1999 sebaiknya tidak perlu lagi diteliti, karena uji t pada variabel ini menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, "Ekonomi Moneter", Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Yogyakarta, BPFE, Cetakan Kelima, 1990.
- Djamin, Zulkarnain, "Pembangunan Ekonomi", Jakarta, LPFE-UI, 1984.
- Dernburg, F. Thomas dan Duncan M. Douglas, "Ekonomi Makro", Jakarta, Bharata.
- Dumairy, "Perekonomian Indonesia", Yogyakarta, BPFE, 1997.
- Iswardono, "Uang dan Bank", Edisi ke-4, Yogyakarta, BPFE, 1990.
- Lucket, G. Deudley, "Uang dan Perbankan", Edisi ke-2, Jakarta, 1983.
- Manullang. M, "Pengantar Teori Ekonomi Moneter", Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1993.
- Muchdarsyah. S, "Uang dan Bank", Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Nopirin, "Ekonomi Moneter", Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, 1992.
- _____, "Ekonomi Moneter", Edisi ke-4, Yogyakarta, BPFE, 1992.
- Partadiredja, Ace, "Perhitungan Pendapatan Nasional", Jakarta, LP3ES, 1983.
- Rahardja, Prathama, "Uang dan Perbankan", Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Sukirno, Sadono, "Pengantar Makro Ekonomi", Jakarta, Rajawali Press, 1994.
- Supranto. J, "Ekonometrik", Buku Satu, Jakarta, LPFE UI, 1984.
- Widodo, T. Suseno, Hg, "Indikator Ekonomi", Dasar Perhitungan Ekonomi Indonesia, Yogyakarta, Kanisius, 1991.
- Yugianto, H.M, "Program Komputer Untuk Analisa Ekonomi", Jakarta, Andi Offset, 1985.

LAMPIRAN 1
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN JUMLAH UANG BEREDAR,
PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN TINGKAT HARGA UMUM
PERIODE 1983 - 1999

TAHUN	JUB (MILYARRUPAH)	PERTUMBUHAN JUB (%)	PDB (MILYARRUPAH)	PERTUMBUHAN PDB (%)	THU	INFLASI (%)
1983	7.569	-	73.697,0	-	221,51	11,46
1984	8.581	13,37	82.475,7	11,9	241,63	8,76
1985	10.109	17,81	84.503,9	2,5	252,20	4,31
1986	11.677	15,51	89.523,3	5,9	275,27	8,83
1987	12.685	8,63	93.758,8	4,7	300,75	8,90
1988	14.392	13,46	99.981,3	6,6	317,56	5,47
1989	20.094	39,62	107.436,5	7,5	336,96	5,97
1990	23.819	18,54	115.110,1	7,1	116,98	9,53
1991	26.341	10,59	122.727,0	6,6	128,60	9,52
1992	28.781	9,26	130.210,0	6,1	135,08	4,94
1993	36.805	27,88	329.991,1	7,0	148,83	9,77
1994	45.374	23,28	354.640,8	7,5	163,17	9,24
1995	52.677	16,10	383.792,3	8,2	177,83	8,64
1996	64.089	21,66	413.797,9	7,8	189,62	6,47
1997	78.345	22,24	433.246,0	4,7	211,62	11,05
1998	101.197	29,17	376.375,0	-13,1	198,47	77,63
1999	124.633	23,16	380.096,9	1,0	202,45	8,84

----- REGRESSION ANALYSIS -----



HEADER DATA FOR: C:ZERO01 LABEL: pengaruh JUB & PDB thd THU
 NUMBER OF CASES: 17 NUMBER OF VARIABLES: 3

INDEX	NAME	MEAN	STD.DEV.
1	JUB	10.2212	.8786
2	PDB	12.0535	.7026
DEP. VAR.: THU		6.4318	.8309

DEPENDENT VARIABLE: THU

VAR.	REGRESSION COEFFICIENT	STD. ERROR	T(DF= 14)	PROB.	PARTIAL r ²
JUB	.7644	.0925	8.259	.00000	.8297
PDB	.2288	.1157	1.977	.06809	.2182
CONSTANT	-4.1385				

STD. ERROR OF EST. = .1140
 ADJUSTED R SQUARED = .9812
 R SQUARED = .9835
 MULTIPLE R = .9917

ANALYSIS OF VARIANCE TABLE

SOURCE	SUM OF SQUARES	D.F.	MEAN SQUARE	F RATIO	PROB.
REGRESSION	10.8646	2	5.4323	418.105	3.300E-13
RESIDUAL	.1819	14	.0130		
TOTAL	11.0464	16			

STANDARDIZED RESIDUALS

	OBSERVED	CALCULATED	RESIDUAL
1	5.400	5.252	.1481
2	5.490	5.399	.0907
3	5.530	5.503	.0267
4	5.620	5.632	-.0116
5	5.710	5.704	.0058
6	5.760	5.810	-.0497
7	5.820	6.086	-.2656
8	6.210	6.232	-.0215
9	6.340	6.324	.0160
10	6.430	6.407	.0235
11	6.780	6.803	-.0227
12	6.870	6.979	-.1092
13	7.100	7.112	-.0122
14	7.320	7.281	.0389
15	7.440	7.434	.0060
16	7.510	7.604	-.0945
17	8.010	7.779	.2313

DURBIN-WATSON TEST = 1.4229

LAMPIRAN 3

Tabel t

df	$t_{1,00}$	$t_{0,50}$	$t_{0,25}$	$t_{0,10}$	$t_{0,05}$	df
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	1
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	2
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	3
4	1.533	2.132	2.376	3.747	4.604	4
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5
6	1.440	1.943	2.447	3.343	3.707	6
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	7
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	8
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	9
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	10
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	11
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	12
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	13
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	14
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	15
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	16
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	17
inf	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	inf

Sumber : Ekonometrik
 Karangan J. Supranto
 LPFE UI, Jakarta 1984

Tabel F (Uji $f = 5\%$)

df	1	2	3	4	5	6	7	-
1	161	200	216	225	230	234	237	239
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4
3	10.1	9.55	9.28	9.12	8.94	8.94	8.89	8.85
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.16	6.16	6.09	6.04
5	6.61	5.79	5.41	5.19	4.95	4.95	4.88	4.82
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.28	4.28	4.21	4.15
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70
-	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64

Sumber : Ekonometrik

Karangan J. Supranto
LPFE UI, Jakarta 1984

Tabel F (Uji $F = 1\%$)

df	1	2	3	4	5	6	7	8
1	4.052	5.000	5.403	5.625	5.761	5.859	5.928	5.987
2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.4	99.4	99.4
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.28	4.14
-	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00

Sumber : Ekonometrik

Karangan J. Supranto

LPFE UI, Jakarta 1984